BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Studi Hubungan Internasional mengalami banyak perkembangan dan perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Studi yang awalnya hanya membahas mengenai politik internasional dan berfokus pada negara sebagai objek utama terus mengalami pergeseran dan lebih membuka diri bagi aktor *non-state* untuk ikut berperan dalam dunia internasional. Suatu negara dalam menjalankan politik luar negerinya pasti menginginkan agar kepentingan nasional negaranya tersebut dapat tercapai dengan baik. Hubungan Internasional sebagai interaksi antara aktor aktor yang tindakan-tindakannya atau kondisi-kondisinya memiliki konsekuensi akibat yang penting bagi pihak-pihak yang lain di luar yuriduksi efektif unit politik (negara) mereka (Ambarita&Wijatmadja 2016: 5).

HI adalah nama singkatan bagi subjek akademis Hubungan Internasional. Alasan utama mengapa kita harus mempelajari HI adalah adanya fakta bahwa seluruh penduduk dunia terbagi ke dalam wilayah komunitas politik yang terpisah, atau negara-negara merdeka, yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia. Secara bersama-sama negara-negara tersebut membentuk sistem internasional yang akhirnya merdeka (Jackson & Sorensen 2009 : 2).

Begitu pula Indonesia yang memiliki prinsip bebas aktif di mana bebas, berarti tidak terikat oleh suatu ideologi atau oleh suatu politik negara asing atau oleh blok negara-negara tertentu, atau negara-negara adikuasa (*super power*) sedangkan aktif artinya dengan sumbangan realistis giat mengembangkan

kebebasan persahabatan dan kerjasama internasional dengan menghormati kedaulatan negara lain dalam menjalankan politik luar negerinya. Untuk mewujudkan hal tersebut, Indonesia menjalin hubungan kerjasama baik dalam wilayah regional maupun wilayah Internasional (Sitepu, 2011: 35).

Australia dan Indonesia adalah dua negara dalam dua benua yang berbeda, yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Indonesia sendiri merupakan bagian dari Benua Asia yang terdiri dari berbagai pulau dan membentuk sebuah negara dengan jumlah penduduk ratusan juta orang yang memiliki letak geografis yang sangat strategis, berbeda dengan Australia yang merupakan benua yang berbentuk pulau yang memiliki wilayah yang luas dan terletak di antara samudra Hindia dan samudra Pasifik, serta di apit oleh kepulauan Asia Tenggara dan daratan Kutub Selatan. Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki letak wilayah yang strategis. Di lihat dari Indonesia berada di letak astronomis adalah letak suatu wilayah di pandang dari kedudukan garis lintang dan garis bujur. Letak wilayah Indonesia dari segi astronomis adalah di antara 6ºLU- 11ºLS dan antara 95º BT-141ºBT (http://www.invonesia.com/letak-astronomis-indonesia.html di akses tanggal 21 Mei 2017).

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia sudah terjalin sejak masa perjuangan kemerdekaan Indonesia sampai saat ini. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia mengalami pasang surut terkadang berada di titik rendah terkadang berada di hubungan yang harmonis. Australia dan Indonesia memiliki sejarah yang berbeda dalam membangun negara masing masing dengan perubahan politik dan ekonomi yang berbeda. Dalam hal ini Indonesia yang baru

merdeka 70 tahun yang silam memiliki berbagai permasalahan dalam membentuk sebuah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan yang demokrastis. Sedangkan dengan Australia yang sudah matang dari mulai pertumbuhan ekonomi dan sistem perpolitikan yang telah Australia lakukan dalam negara mereka sendiri. (http://www.kemlu.go.id/canberra/Lists/CountryProfile/DispForm.aspx?ID=7,di akses tanggal 12 Mei 2017).

Indonesia memandang Australia sebagai mitra yang sangat strategis dalam menjalankan hubungan kerjasama. Indonesia juga memandang Australia sebagai mitra strategis yang memiliki kekuatan, tantangan dan komitmen baru kedua negara untuk bekerja lebih erat, baik pada tataran bilateral, regional maupun global. Kedua negara demokratis merupakan teman dekat dan memiliki sejarah panjang dalam menjalin hubungan kerjasama dan sebagai mitra dalam memajukan kesejahteraan, perdamaian keamanan antara kedua negara di tambah lagi dengan wilayah di kawasan. Kedua negara yang sangat strategis dalam melakukan kerjasama(http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2007/08/070827_australia .shtm di akses 22 Juni 2017).

Suatu bentuk kerjasama di antara dua negara baik yang berdekatan secara geografis maupun yang jauh dari seberang lautan dengan sasaran utama untuk menciptakan kerjasama politik kebudayaan dan struktur ekonomi. Kerjasama Indonesia dan Australia terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan antara Indonesia dan Australia telah di mulai sejak tahun 2012 dengan penandatanganan *Subsidiary Arrangement* pada awal tahun 2012. Australia memiliki program AusAID yaitu program badan utama pemerintah Australia

dalam perang global untuk memberantas kemiskinan. Dalam menghadapi tantangan yang cukup besar tak terkecuali di kawasan Asia-Pasifik, pemerintah Australia mengintensifkan upaya untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs). Sebagai salah satu negara donor yang lebih besar di wilayah ini, Australia memiliki tanggung jawab khusus dan dalam meningkatkan hubungan bilateral yang terjadi di antara negara-negara untuk membantu negara-negara berkembang di kawasan Asia-Pasifik termasuk Indonesia. Australia yang telah banyak melakukan hubungan bilateral dengan Indonesia dalam berbagai sektor seperti ekonomi, pertahanan politik dan budaya (http://dfat.gov.au/about us/publications/Pages/empowering-indonesian-women-for-poverty-reduction-mampu-program-design-document.aspx di akses pada tanggal 23 Juni 2017).

Kerja sama antara pemerintah Indonesia-Australia dan hubungan antara kedua bangsa semakin meningkat. Pemerintah kedua negara bekerja keras untuk membina saling pengertian antara bangsa Indonesia dan Australia. Sehubungan dengan hal tersebut, sedang di kembangkan hubungan yang lebih akrab dalam perniagaan, politik, pendidikan, kesenian, media dan komunikasi, olahraga dan profesi (http://dfat.gov.au/aid/Pages/australias-aid-program.aspx di akses pada tanggal 22 Juni 2017). Adapun kerjasama yang telah di sepakati oleh Indonesia terhadap mitra yang di lakukan pemerintah Australia. *Pertama, Australia Indonesia Partnership for Emerging Infectious Diseases* (AIP-EID) adalah kemitraan yang memperkuat pelayanan kesehatan hewan di Indonesia di berbagai bidang teknis dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah

(http://www.agriculture.gov.au/animal/health/emerging-infectious-diseases di akses pada tanggal 23 Juni 2017).

Kedua, Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG) mendukung niat pemerintah Indonesia untuk meningkatkan tingkat mutu manajemen ekonomi, dan melalui hal ini, memberi sumbangsih pada pertumbuhan berbasis luas dan pengentasan kemiskinan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (http://aipeg.or.id/ di akses pada tanggal 23 Juni 2017).

Tiga, Australia-Indonesia Partnership For Justice (AIPJ) bertujuan untuk memberi sumbangsih pada keberhasilan Indonesia. *Australia-Indonesia Partnership For Justice* (AIPJ) berupaya untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia terus berlangsung secara inklusif dan memberi manfaat kepada seluruh rakyat Indonesia. Lembaga yang bertanggung jawab, layanan yang mudah di akses serta masyarakat madani yang aktif adalah esensial untuk tata kelola pemerintahan yang adil dan efektif serta perlindungan warga yang rentan (http://www.aipj.or.id/en/main di akses pada tanggal 23 Juni 2017).

Empat, Beasiswa *Australia Awards* merupakan bagian penting bantuan pendidikan Australia kepada Indonesia. Banyak alumni beasiswa telah berhasil menduduki posisi berpengaruh (http://australiaawards.gov.au/Pages/default.aspx diakses pada tanggal 23 Mei 2017.

Lima, Australian Volunteers for International Development (AVID) memberikan kesempatan bagi warga Australia yang berketerampilan untuk berkontribusi terhadap program bantuan yang di berikan oleh pemerintah

Australia (http://dfat.gov.au/people-to-people/avid/pages/avid.aspx di akses pada tanggal 20 Mei 2017.

Enam, *Direct Aid Program (*DAP) adalah skema hibah kecil fleksibel yang di danai oleh pemerintah Australia dan di kelola oleh Kedutaan Besar Australia di Jakarta (http://indonesia.embassy.gov.au/jakt/DAP2017-18.html di akses pada tanggal 20 Juni 2017).

Tujuh, *Indonesia Insfrastrukture Initiave* (IndII) bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk memajukan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kebijakan, perencanaan dan investasi infrastruktur. *Indonesia Insfrastrukture Initiave* (IndII) fokus terutama pada isu-isu air dan sanitasi serta transportasi (dengan perhatian khusus pada jalan, pelabuhan, mobilitas perkotaan, dan keterhubungan multi-modal), maupun sejumlah isu kebijakan lintas-sektor (http://www.indii.co.id/index.php/en/ di akses pada tanggal 21 Mei 2017).

Delapan, Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) adalah fasilitas pemerintahan yang mendukung Pemerintah Indonesia untuk mencapai target pengurangan kemiskinan lima tahun dengan meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dasar dan dengan meningkatkan kesempatan ekonomi bagi warga kurang mampu dan rentan (http://kompak.or.id/id di akses pada tanggal 21 Mei 2017).

Sembilan, *Knowledge Sector Initiative* (KSI) berupaya untuk meningkatkan kehidupan rakyat Indonesia melalui kebijakan-kebijakan publik yang bermutu lebih baik dengan memanfaatkan penelitian, analisis dan bukti

secara lebih baik (http://www.ksi-indonesia.org/en/home di akses pada tanggal 21 Mei 2017).

Sepuluh, Program Peduli membantu upaya-upaya pengentasan kemiskinan pemerintah Indonesia dengan bermitra dengan organisasi-organisasi masyarakat madani untuk memastikan masyarakat yang di sisihkan dan di pinggirkan secara sosial mendapat manfaat dari layanan publik dan peluang-peluang ekonomi (https://programpeduli.org/ di akses pada tanggal 22 Mei 2017).

Sebelas, Peningkatan Pendapatan Pedesaan melalui Penguatan Pasar Pertanian (PRISMA) mendukung tujuan AIP-Rural dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan sebanyak 30% atau lebih pendapatan bersih untuk 300.000 petani miskin, baik laki-laki maupun perempuan, di perdesaan kawasan Indonesia timur pada tahun 2018 (http://aip-rural.or.id/prisma/index.php di akses pada tanggal 22 Mei 2017).

Duabelas, Pemerintah Australia bekerja sama dengan Indonesia untuk mengikis kemiskinan dan peminggiran berbasis-gender. Selama jangka waktu delapan tahun, MAMPU akan fokus pada pengentasan kemiskinan perempuan dan pemberian dukungan pada organisasi-organisasi yang berjuang untuk perempuan yang miskin (http://www.mampu.or.id/id di akses pada tanggal 10 Juni 2017).

Pada kedua belas Kemitraan tersebut memiliki dukungan pada peningkatan hubungan bilateral antara kedua negara. Salah satu kemitraan tersebut menarik perhatian peneliti untuk mengetahui lebih dalam yaitu program MAMPU di mana kemitraan antara Australia dengan pemerintah Indonesia ini terkait sebuah Program Maju Perempuan Indonesia dalam Menanggulangi

Kemiskinan (MAMPU) pada tahun 2012-2016 yang membahas tentang bagaimana tingkat kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Indonesia (http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/cooperation.html di akses pada tanggal 10 Juni 2017).

Dalam penelitian ini peneliti fokus kedalam pemberdayaan perempuan. Pada kenyataannya bahwa perberdayaan perempuan menjadi pusat perhatian masyarakat banyak dan negara negara termasuk PBB seperti yang di keluarkan UNDP bahwa *Gender Inequality Index* (GII) menunjukkan bahwa kondisi perempuan masih tergolong buruk. Indeks itu mengukur tingkat kesetaraan dan ketidaksetaraan perempuan dari tiga faktor, yaitu tingkat kesehatan reproduksi, terutama dari tingkat kematian ibu dan tingkat kelahiran remaja, tingkat pemberdayaan, terutama dari berapa banyak perempuan yang meraih pendidikan sekolah menengah dan berapa banyak perempuan yang duduk di parlemen, serta dari status ekonomi yaitu berapa besar perempuan berusia di atas 15 tahun yang masuk dalam angkatan kerja produktif (https://www.voaindonesia.com/a/cedaw-pastikan-isu-pemberdayaan-perempuan-tetap-jadi-perhatian-pbb/2459357.html di akses pada tanggal 23 Mei 2017).

Program MAMPU merupakan program yang mendukung pembangunan jaringan dan koalisi inklusif perempuan dan organisasi masyarakat sipil (‘mitra’ MAMPU), serta anggota parlemen untuk mempengaruhi kebijakan, regulasi dan layanan pemerintah dan sektor swasta yang terpilih sepanjang fase pertama MAMPU (2012-2016). Program MAMPU dapat memberikan manfaat kepada perempuan miskin serta dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan

pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pemerintah Australia yang di wakili oleh *Department of Foreign Australia Trade* (DFAT) telah berkomitmen untuk berbagi pengalaman keahlian dan kedekatan dalam hal kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan Indonesia (https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/penandatanganan-subsidiary-arrangement-program-mampu-kemitraan-australia-dan-indonesia-untuk-pemberdayaan-perempuan-fase-ii/di akses pada tanggal 23 Juni 2017).

Dalam catatan sejarah menyatakan bahwa perempuan telah mendapatkan diskriminasi dari hak hidup, hak emansipasi, serta hak – hak lainnya sebagai manusia. Banyak faktor yang menyebabkan perlakuan itu ada, yang pasti seringkali perempuan di tempatkan pada posisi yang tidak menguntungkan dan terbelakang. Peta perlakuan menurut perempuan (Ritzer, 2012: 494), di bagi dalam empat bentuk : *yang pertama*, Perbedaan Gender pada posisi ini perempuan serta pengalamannya dalam berbagai situasi berbeda dengan laki – laki. Perbedaan ini seringkali ditumpukan pada 3 hal yaitu biologis keutuhan institusional sosial untuk menjalankan peran sosial yang berbeda, dan kebutuhan eksistensi.

Kedua, Ketimpangan Gender Kedudukan perempuan di banyak situasi tidak hanya berbeda namun juga kalah atau tidak setara dengan laki laki. *ketiga*, Penindasan gender pada posisi ini perempuan tidak hanya berbeda atau tidak setara, namun juga juga mengalami diskriminasi, disubordinasi, diatur, dan digunakan serta disalah gunakan oleh laki-laki.

Keempat, Penindasan struktural pegalaman perempuan berupa perbedaan, ketimpangan, dan penindasan berbeda menurut kedudukan sosial mereka di dalam

kapitalisme, patriarkhi dan rasisme. Keempat kondisi diatas merupakan realitas kehidupan perempuan yang dapat di kategorikan dalam posisi yang bermasalah dan menjadi prioritas untuk di atasi secara komprehensif sebagai upaya pengentasan perempuan dari kondisi itu semua.

Hak Asasi Manusia (HAM) juga di perlukan oleh perempuan berdasarkan penerapan undang undang bahwa setiap manusia memperoleh hak yang semestinya mereka peroleh. Perempuan seringkali di berdayakan karena di anggap derajatnya lebih rendah di bandingkan dengan laki laki.

Meratifikasi konvensi CEDAW yang merupakan salah satu konvensi perempuan dengan UU Nomor 7 Tahun 1984. Ketertinggalan kaum perempuan ini dapat di lihat dari pembagian kerja secara seksual di dalam masyarakat, di mana peran perempuan adalah di lingkungan rumah tangga dan peran pria di luar rumah. Pembagian pekerja secara seksual ini jelas tidak adil bagi perempuan sebab dapat menempatkan perempuan pada kedudukan *subordinate*/terpinggirkan terhadap pria sehingga cita-cita untuk mewujudkan perempuan sebagai mitra sejajar pria baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat sulit terlaksana. Untuk itu perlu adanya pemberdayaan perempuan sehingga tidak menempatkan perempuan pada kedudukan yang termajinalkan (*UN Women*), Konvensi ini adalah mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan *Convention On Elimination Discrimination Against Women* (CEDAW) di seluruh dunia termasuk Indonesia. Konvensi ini dapat membantu perempuan Indonesia dalam menghadapi adanya diskriminasi di sekitarnya

(http://www.unwomeneseasia.org/projects/Cedaw/docs/KonvensiCEDAWtextBahasa.pdf diakses pada tanggal 24 Juni 2017).

Dalam jurnal perempuan, Diana Pearce pada tahun 1978 mengeksplorasi dua aspek yakni adanya perbedaan dalam sumber pendapatan yang mungkin menjadi penyebab kemiskinan perempuan dan sistem jaminan kesejahteraan terutama bagi perempuan miskin. Selain itu, permasalahan lain yang di jelaskan Diana adalah soal rasisme dan praduga negatif terutama terhadap perempuan minoritas. Faktor rasis membuat proses pembangunan berlangsung secara eksklusif dan tidak mendatangkan manfaat bagi semua pihak terutama kepada kaum perempuan yang berasal dari kalangan minoritas. Akhirnya, kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi menjadi tidak maksimal akibat kurang perhatian dari pemerintah terhadap perempuan di karenakan adanya diskriminasi (http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jurnal-perempuan.html) di akses pada tanggal 24 Juni 2017).

Kedudukan perempuan dan perannya di Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan dan di semua kelompok etnis, tak lepas pula dari permasalahan di atas. Idealnya sebanyak mungkin peranan dan kedudukan wanita di setiap etnis dikupas, tetapi tentu itu kerjaan yang sangat sulit. Tetapi dengan pergerakan perempuan yang kita lihat dan rasakan hasilnya saat ini, bukan merupakan sesuatu yang tiba-tiba ada, dan semata sebagai anugerah Tuhan, karena jika menilik lebih jauh pada sejarahnya, perjuangan perempuan untuk memperjuangkan hak-hak mereka di hadapan masyarakat dan hukum sudah dimulai sejak berabad-abad yang lalu, baik di luar maupun di dalam negeri. Hal ini dilakukan, saat perempuan

memiliki kesadaran aktif akan apa yang sebenarnya sedang mereka alami, sehingga semangat untuk mencapai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan (http://www.kompasiana.com/echyrosalia/permasalahan-gender-di-indonesia di akses pada tanggal 20 Mei 2017)

Istilah ’*empowerment*’ berasal dari perkataan bahasa Inggris yang diterjemahkan ’pemberdayaan’ atau ’pemampuan’. Dalam *Webster* dan *Oxford English Dictionary*, kata *empower* mengandung dua makna, yaitu: *to give power or authority dan to give ability to or to anable to*. Pengertian pertama bermakna memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan kepihak lain. Pengertian kedua bermakna sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan (Lukman Arif, Prijino&Pranarka, 2013: 24).

Pemberdayaan perempuan adalah usaha pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, politik, sosial dan budaya agar perempuan dapat mengatur diri , meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif guna memecahkan masalah pembangunan serta mampu membangun dirinya (Anonymous, 2010: 35)

Dengan adanya organisasi perempuan di Indonesia dapat memikirkan dan memecahkan masalah mereka secara bersama-sama. Organisasi perempuan tersebut menjadi momentum perempuan untuk tidak lagi terkungkung di wilayah domestik. Ini sekaligus membalikkan pandangan mayoritas yang menyebut bahwa perempuan cuma bisa berperan dalam sektor domestik. Melalui organisasi perempuan dapat mengubah pandangan politik yang secara tradisional selalu menempatkan arena publik sebagai wilayah laki-laki dapat di pertanyakan atau di

kaji ulang. Perempuan perlu terlibat dalam proses tata kelola pemerintah (*governance)* yang lebih luas sehingga ada *alternative income* bagi keluarga terutama ketika laki-laki sebagai kepala keluarga tidak bisa mencukupi nafkah secara maksimal dan optimal untuk kebutuhan keluarga (Pin-Fat, 2013:145).

Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak merupakan bagian penting dalam upaya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Pembangunan nasional selayaknya memberikan akses yang memadai bagi perempuan dan anak untuk berpartisipasi dalam pembangunan, memanfaatkan hasil-hasil pembangunan, serta turut mempunyai andil dalam proses pengendalian/kontrol pembangunan. Selain itu, pembangunan nasional harus memegang prinsip pemenuhan hak asasi manusia, yang salah satunya tercermin dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender serta hak-hak anak yang tidak terabaikan.

Kesetaraan dan keadilan gender merupakan hak penduduk perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan kesempatan yang sama, baik dalam hal mengakses, menerima manfaat, mengendalikan, maupun berpartisipasi dalam pembangunan. Keberhasilan dari upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia antara lain ditunjukkan dengan meningkatnya akses dan partisipasi perempuan dalam pembangunan dan menurunnya angka kemiskinan sehingga di perlukan kesetaraan gender (https://www.bappenas.go.id/files/7813/6508/0386/tujuan-iii-mendorong-kesetaraan-gender-dan-pemberdayaan perempuan__20081122223513__942__4.pdf2017).

Kemiskinan menjadi salah satu ukuran untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Sebagai suatu ukuran agregat, tingkat kemiskinan penduduk di suatu wilayah lazim di gunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan seringkali di ukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan. Faktor ekonomi memang menjadi sangat berpengaruh terhadap kemampuan finansial seseorang. Sejak krisis ekonomi yang melanda Indonesia pertengahan tahun 1997, telah mengakibatkan kondisi perekonomian Indonesia kian terpuruk dan mengakibatkan bertambahnya penduduk miskin. Akibat krisis yang terus berkelanjutan, sampai dengan akhir tahun 1998 jumlah penduduk miskin menjadi 49,5 juta jiwa atau sekitar 24,2 % dari jumlah penduduk Indonesia bermasalah dengan jumlah kemiskinan yang meningkat setiap tahunnya semakin bertambah. (http://www.worldbank.org/in/country/indonesia/brief/reducing-extreme-poverty-in-indonesia diakses 28 Juni 2017).

Jumlah penduduk yang meningkat tersebut terutama disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk yang berada sedikit di atas garis kemiskinan. Dalam kondisi krisis, kenaikan harga-harga yang tidak diikuti oleh kenaikan pendapatan nominal menyebabkan garis kemiskinan bergeser ke atas sehingga penduduk yang semula tidak termasuk miskin menjadi miskin (UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional(Propenas)) dalam hal ini fungsi dari Program Pembangunan nasional (Propenas) sebagai pengatur dari kebijakan yang berskala nasional (https://www.bappenas.go.id/files/6113/5228/1490/info.pdf di akses pada tanggal 21 Mei 2017).

Berbagai kebijakan publik telah dilaksanakan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Kebijakan publik tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, memiliki dampak terhadap pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin terlebih bagi kaum perempuan. Dampak pelaksanaan kebijakan publik dapat berupa perbaikan taraf hidup masyarakat miskin ataupun munculnya masyarakat miskin baru. Oleh sebab itu, perlu adanya pengkajian ulang yang dilakukan untuk menilai dampak pelaksanaan kebijakan publik terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat perempuan Indonesia yang miskin. Pengkajian ulang kebijakan juga berguna untuk memahami seberapa jauh komitmen dan kemitraan berbagai pihak dalam penanggulangan kemiskinan (http://www.tnp2k.go.id/id/program/sekilas/ di akses pada tanggal 24 Mei 2017).

Tingkat kemiskinan di Indonesia terkhusus perempuan masih rendah beserta dengan pemberdayaan ekonominya. Kondisi kesetaraan gender di Indonesia dalam bermasyarakat seringkala ada perbedaan gender terkadang dapat menimbulkan suatu ketidakadilan terhadap kaum laki-laki dan terutama kaum perempuan.

Bidang pembangunan yang tidak merata di seluruh Indonesia sehingga banyak masyarakat yang tidak mendapatkan kehidupan yang tidak layak terkhusus bagi perempuan Indonesia. Banyak tantangan yang dihadapi mulai dari tingakat kesehatan yang rendah, pendidikan yang tidak merata, ekonomi, serta layanan pemerintah, disparitas sosial dan ekonomi, ketidaksetaraan gender yang memecah masyarakat(https://www.unicef.org/indonesia/id/UNICEF_Annual_Report_(Ind)_130731.pdf di akses pada tanggal 11 Juni 2017)

Penelitian-penelitian mengenai pemberdayaan perempuan adalah salah satunya karya ilmiah berupa skripsi yang telah dilakukan oleh Arif dari Universitas Sumatera Utara mengenai Negara dan Kesetaraan Gender: Suatu Studi Wacana Perempuan Indonesia dalam Politik Indonesia. Pada penelitian tersebut terdapat perbedaan yaitu diskriminasi terhadap perempuan dalam proses politik mulai ditingkat lokal sampai tingkat nasional. Adapun persamaan antara penelitian saya dan arif adalah peran perempuan dapat dilihat dari partisipasi didunia kerja.

Penelitian lainnya adalah mengenai Organisasi Perempuan (Studi Kasus Aisyiah Di Kota Medan) pada tahun 2015 di Universitas Sumatera Utara. Peneliti mengamati peran perempuan sangat penting untuk keseimbangan kehidupan terkhususnya suatu pembangunan. Aisyiah merupakan salah satu mitra dari program MAMPU.

Selain itu ada juga penelitian yang dilakukan Dewi Kurniasih dengan judul Kesetaraan gender dan ketidakadilan di Indonesia yang dibuat pada tahun 2013 dari Universitas Komputer Indonesia. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah mengembangkan kapasitas perempuan dalam menwujudkan keadilan dan kesetaraan gender dan perbedaannya dalam penelitiaan ini peneliti membahas kemitraan yang dilakukan Indonesia-Australia melalui program MAMPU.

Dengan kondisi perempuan Indonesia yang memprihatinkan maka, pemerintah Indonesia diwakili oleh Kementerian Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Pemerintah Australia yang diwakili oleh *Departement Of Foreign Australia Trade* (DFAT) meluncurkan kerjasama

dalam upaya pengentasan kemiskinan, yang dinamakan "Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan" atau MAMPU. Program yang diluncurkan pada tahun 2012 dan di resmikan oleh perwakilan kedua pemerintahan ini dari pemerintah di Indonesia di wakili oleh Kementerian Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan dari pemerintahan Australia diwakili oleh *Departement Of Foreign Australia Trade* (DFAT), memusatkan fokus intervensi pada perempuan miskin dan organisasi-organisasi perempuan yang memperjuangkan hak-hak perempuan miskin. Dengan melihat kondisi perempuan yang ada di Indonesia maka peneliti membuat penelitian tentang pemberdayaan perempuan Indonesia (http://dfat.gov.au/pages/default.aspx).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut yang menjadi dasar pertimbangan peneliti untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Kemitraan Indonesia-Australia Melalui Program Maju Perempuan Indonesia Untuk Penanggulangan (MAMPU) Untuk Pemberdayaan Perempuan ”

Adapun ketertarikan peneliti untuk meneliti dan mengangkat isu tersebut didukung oleh beberapa mata kuliah disiplin Ilmu Hubungan Internasional, diantaranya adalah sebagai berikut**:**

1. Hubungan Internasional di Australia dan Pasifik, dalam mata kuliah ini mempelajari kebijakan-kebijakan, kerjasama dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap kepala negara pada periodenya. Mempelajari sejarah kerjasama Indonesia dan Australia yang pernah terjadi serta memahami karakteristik kebijakan yang diambil negara kawasan Australia dan Pasifik.

2. Diplomasi dan Negosiasi, dalam mata kuliah ini mempelajari mengenai strategi dalam melakukan diplomasi dan negosiasi dalam upaya Indonesia dan Australia dalam menangani kesetaraan gender di kedua negara.
3. HAM dan Demokrasi dalam mata kuliah ini mempelajari mengenai pemahaman tentang hak asasi manusia (HAM) karena Demokrasi dengan HAM sangat erat kaitannya.
4. Gender dalam mata kuliah ini membahas tentang tingkat kesetaraan Gender dan melalui mata kuliah ini meneliti bisa menganalisa perkembangan Gender.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka timbul beberapa permasalahan yang diambil peneliti.

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Berdasarkan latar belakang masalah dari tulisan yang diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:”Bagaimana kemitraan Indonesia-Australia dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di Indonesia pada tahun 2012-2016?”

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

1. Bagaimana implementasi dari Program MAMPU dalam Pemberdayaan Perempuan Indonesia ?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Indonesia dalam Menjalankan Program MAMPU di Indonesia?

3. Prospek kinerja dari kemitraan Indonesia-Australia terhadap hasil pemberdayaan perempuan di Indonesia?

Untuk memfokuskan lingkup kajian yang akan peneliti lakukan, maka peneliti membatasi penelitian ini dalam kurun waktu empat tahun yaitu pada tahun 2012-2016, dengan alasan pada tahun 2012 periode ini adalah awal terbentuknya Program MAMPU dan pada tahun 2016 merupakan akhir dari fase pertama dari program MAMPU.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini pada hakekatnya mempunyai tujuan dan kegunaan yang dimaksud untuk mengetahui lebih jelas dari sumber yang akurat tentang program yang dilakukan Kementerian Badan Perencanaaan dan Pembangunan Nasional Indonesia terhadap program yang di bentuk melalui kemitraan yang dilakukan dengan pemerintah Australia terkait dengan penangulangan kemiskinan pada perempuan Indonesia dalam meningkatkan kemitraan untuk pemberdayaan perempuan.

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dicapai peneliti yaitu:

a. Mengetahui implementasi dari program MAMPU dalam pemberdayaan perempuan Indonesia.
b. Untuk Mengetahui dan memahami kendala dari Kemitraan Indonesia - Australia melalui program MAMPU dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di Indonesia.

c. Untuk mengetahui perkembangan kinerja dari program yang telah dilakukan dan hasil yang didapatkan oleh perempuan Indonesia dalam memperoleh kehidupan yang lebih layak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan mendapat pengetahuan secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat berguna dan berkontribusi bagi perkembangan kerjasama Indonesia dan Australia dalam menyetarakan gender dapat menambah wawasan secara teoritis dalam perkembangan pemberdayaan perempuan dalam menanggulangi kemiskinan melalui organisasi perempuan. Dan dapat dijadikan sebagi bahan pertimbangan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian terkait topik ini. Bagi peneliti diharapkan peneliti diharapkan penelitian ini dapat memberi tambahan wawasan dan pengetahuan hubungan internasional.

1.4.2 Kegunaan Praktik

Secara praktis di harapkan melalui penelitian ini dapat lebih berguna dalam memahami tentang kesetaraan gender. Melalui penelitian ini Perempuan Indonesia semakin lebih maju dan mempunyai pemikiran yang inovatif dan modern karena perempuan zaman sekarang bukan lagi hanya bekerja di rumah. Sebagai upaya bagi perempuan untuk mendorong pemberdayaan dalam membangun perempuan dalam berbagai bidang.